

Tahun 2025

Madani 

# Laporan Tahunan MADANI Berkelanjutan



© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan





## Penulis

Yosi Amelia  
Resni Soviyana  
Trias Fetra  
Riza Egi Arizona  
Luluk Uliyah  
Izhar Alkharifard  
Aizah Fajriana Dewi Handini  
Sadam Afian Richwanudin

## Editor

Nadia Hadad  
Giorgio Budi Indrarto

## Desain & Tata Letak

Izhar Alkharifard  
Sekar Ayu Kencana Wulan  
Fabia Hulwa Shelfia Putri

## Kredit Foto

Danar Tri Atmojo/MADANI Berkelanjutan  
Izhar Alkharifard/MADANI Berkelanjutan  
Aizah Fajriana/MADANI Berkelanjutan



Copyright © 2026 by Yayasan MADANI Berkelanjutan  
All rights reserved. This report or any portion there  
of may not be reproduced or used in any manner whatsoever  
without the express written permission of the publisher.

Yayasan MADANI Berkelanjutan contact:  
Jl. Raya Masjid Al Hidayah No.14a, RT.6/RW.7,  
Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

[www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

# Daftar Isi

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kilas Balik 2025</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>Kata Pengantar</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>Tentang MADANI Berkelanjutan</b>                   | <b>10</b> |
| <b>Perkembangan Program</b>                           | <b>14</b> |
| <b>Komunikasi Strategis dan Manajemen Pengetahuan</b> | <b>22</b> |
| <b>Analisis Dampak &amp; Pembelajaran</b>             | <b>28</b> |
| <b>Laporan Keuangan</b>                               | <b>31</b> |
| <b>Penutup</b>                                        | <b>32</b> |
| <b>Ajakan Kolaborasi</b>                              | <b>33</b> |





# 20 25

Demokrasi goyah, politik riuh, bumi resah  
Harapan harus tumbuh di tengah  
keadilan yang menjauh



# Kilas Balik 2025

## Menjaga Tapak, Mengawal Kebijakan: Setahun Menanam Harapan

**T**ahun 2025 merupakan titik krusial bagi perjalanan iklim Indonesia. Di tengah transisi kepemimpinan nasional dan dinamika geopolitik global yang mempengaruhi pembangunan dan arah kebijakan iklim, MADANI Berkelanjutan berdiri bersama kelompok masyarakat sipil Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan realita masyarakat di tingkat tapak.

Dari hutan Kapuas Hulu hingga pesisir Maluku, kami bekerja melampaui angka-angka. Kami berupaya membangun sistem, memperkuat suara kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, perempuan, dan orang muda, serta mengawal kebijakan agar berpihak pada mereka yang paling rentan dan terdampak krisis iklim.

Laporan ini merekam perjalanan tersebut, kolaborasi yang terjalin, pembelajaran yang tumbuh, serta dedikasi bersama dalam menanam harapan bagi Indonesia yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.



© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan



# Kata Pengantar

## Menjembatani Inovasi untuk Masa Depan Lestari

Tahun 2025 menandai sembilan tahun kehadiran MADANI di tengah dinamika masyarakat sipil Indonesia. Selama sembilan tahun proses belajar, bertumbuh, dan memperkuat peran. Di tahun ini, kami memilih untuk memusatkan energi pada satu kata kunci yaitu **resiliensi**. Catatan kerja sepanjang 2025 menunjukkan bahwa solusi iklim yang paling berkelanjutan sering kali lahir dari kearifan lokal, ketika didukung oleh teknologi dan kebijakan yang tepat.

Inilah yang mendorong kami untuk terus menyempurnakan PADI (Pranala Aksi Data Indonesia), sebuah sistem yang membantu petani swadaya menerapkan praktik usaha berkelanjutan melalui transparansi berbasis data. Sejalan dengan itu, kami juga memelopori pengembangan Biodiesel Berbasis Komunitas sebagai bagian dari Transisi Energi Berbasis Komunitas, guna mendorong kemandirian energi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Upaya di tingkat tapak tersebut kami lengkapi dengan advokasi kebijakan yang konsisten dan berbasis bukti. Sepanjang tahun ini, MADANI memberikan masukan strategis untuk berbagai agenda kebijakan nasional dan global, termasuk Second NDC, desain dan tata kelola *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF), serta *safeguard* untuk perdagangan karbon. Kami juga terlibat aktif dalam penyusunan masukan kebijakan, termasuk rancangan naskah akademik untuk memperkuat RUU Keadilan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan Revisi RUU Kehutanan. Kami meyakini bahwa tanpa payung hukum yang kuat bagi masyarakat adat dan kelompok rentan, keadilan iklim tidak akan terwujud.

Kerja tersebut tidak hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga berakar kuat di wilayah tapak seperti Kapuas Hulu. Sepanjang 2025, MADANI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas adat, orang muda, pelaku usaha lokal, serta jejaring masyarakat sipil untuk merancang arah ekonomi lokal yang selaras dengan perlindungan ekosistem. Dari pengembangan portofolio investasi lestari hingga ruang dialog lintas aktor, proses ini menjadi contoh bagaimana pembelajaran dari daerah dapat memperkaya diskursus nasional dan global tentang pembangunan berkeadilan.

Di saat yang sama, tahun 2025–2026 menandai periode penting menuju COP30. MADANI berperan dalam mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil, peneliti, komunitas lokal, dan mitra global untuk merumuskan pesan bersama mengenai keadilan iklim, perlindungan hutan tropis, dan pendanaan iklim yang adil. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa pengalaman dan suara dari tingkat tapak Indonesia dapat hadir secara lebih kuat dalam percakapan global, sekaligus memperkuat posisi masyarakat sipil dalam merespon dinamika kebijakan yang terus berubah.

Laporan tahunan ini kami hadirkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada mitra, donor, dan terutama kepada masyarakat sipil Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa setiap sumber daya yang dipercayakan kepada kami, telah diwujudkan dalam upaya nyata untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan kehidupan masyarakat yang lebih berdaya.

Terima kasih telah berjalan bersama kami. Mari terus berkolaborasi untuk menjaga ekosistem tetap lestari dan memastikan kedaulatan rakyat di tengah krisis iklim yang terus berlangsung.

Salam hangat,  
**Nadia Hadad**  
Direktur Eksekutif





# Tentang MADANI BERKELANJUTAN

MADANI Berkelanjutan adalah organisasi nirlaba yang bekerja sebagai katalisator untuk memperkuat keadilan iklim di Indonesia. Kami memfasilitasi dialog di antara aktor lintas sektor, dari komunitas akar rumput hingga pembuat kebijakan, untuk menciptakan solusi yang adil, berbasis bukti, dan berdampak global.



## Visi

Mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal.

## Misi



Menggerakkan pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal.



Memperkuat advokasi kebijakan publik untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan inklusif.



Memperkuat suara masyarakat sipil melalui wawasan strategis, advokasi, dan kampanye untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan berkelanjutan.

# Cara Kami Bekerja

## Dari Kolaborasi Menuju Advokasi Berbasis Bukti

MADANI Berkelanjutan bekerja melalui siklus yang terukur untuk memastikan setiap inisiatif memiliki akar yang kuat di masyarakat dan dampak nyata di tingkat kebijakan. Kami bekerja dengan pendekatan C.A.I.A.



### Collaborate (Kolaborasi)

Semua dimulai dengan membangun ruang dialog, pertukaran informasi, dan pendalaman konteks bersama mitra. Kami percaya bahwa solusi yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari kesepahaman kolektif dan pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan.



### Activate (Aktivasi)

Gagasan yang lahir dari kolaborasi tersebut kemudian diaktivasi menjadi aksi-aksi nyata. Kami menggerakkan jejaring dan sumber daya untuk menguji coba ide-ide yang telah disepakati bersama.



### Innovate (Inovasi)

Hasil dari aktivasi tersebut ditransformasikan menjadi inovasi yang praktis mencakup riset, teknologi, sistem data, maupun model pengelolaan sumber daya yang relevan dengan tantangan di lapangan.



### Advocate (Advokasi)

Inovasi-inovasi yang telah teruji ini kemudian menjadi pedoman dalam melakukan advokasi kebijakan. Kami mendorong inovasi tersebut agar diadopsi menjadi kebijakan publik yang lebih luas, inklusif, dan berkeadilan.



© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan





© Muhammad Mardian / MADANI Berkelanjutan

## Fokus Program Kami: Mencari Solusi untuk Krisis Iklim

MADANI mengintegrasikan empat pilar program kunci yang dirancang untuk menjawab tantangan dan dampak krisis iklim.



### Iklim dan Ekosistem

Bertujuan untuk memperkuat ambisi dan aksi iklim dengan memastikan peran penting hutan dan ekosistem dalam mengatasi krisis iklim. Program ini berfokus pada penguatan kebijakan dan tata kelola hutan dan ekosistem, serta memastikan perlindungan dan pengakuan hak-hak kelompok rentan.

### Agrikultur Berkelanjutan

Berfokus dalam memperkuat tata kelola di sektor-sektor perkebunan terutama sawit, karet, kakao, dan kopi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil, penerimaan pasar, dan kontribusi terhadap aksi iklim.



### Transisi Energi Berbasis Komunitas

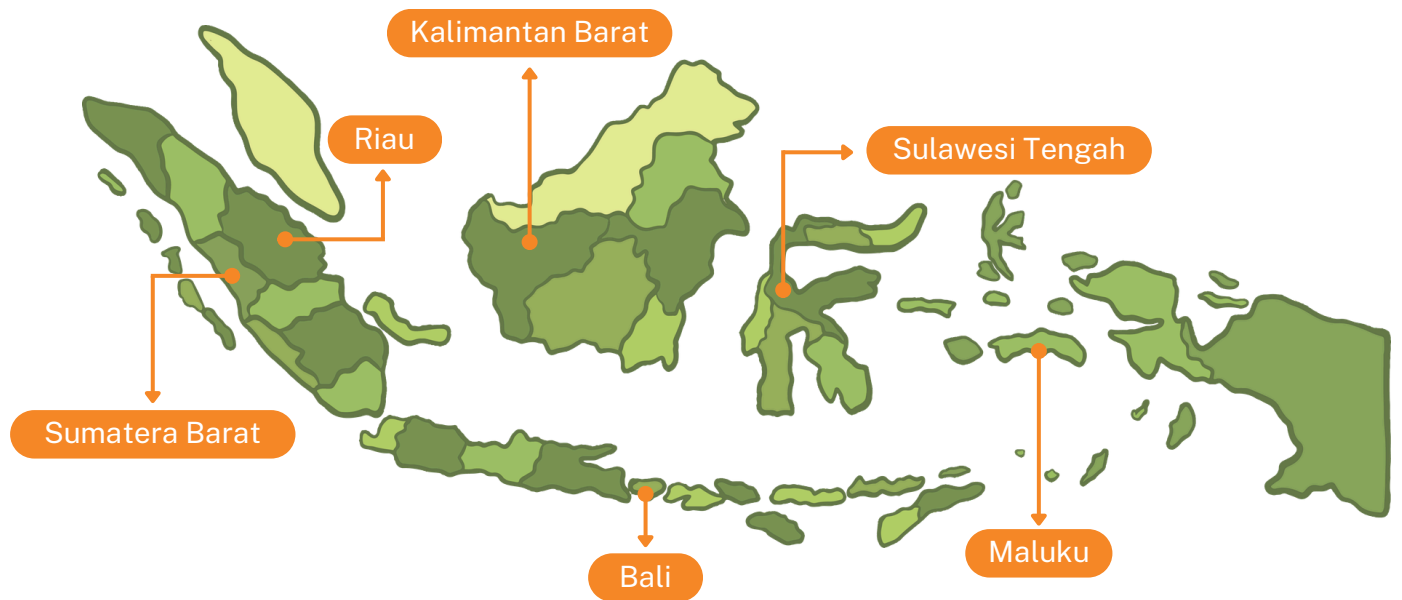
Memastikan Transisi Energi di Indonesia tidak menciptakan ketidakadilan sosial dan ekologis baru, dengan melindungi hutan alam tersisa dan lahan gambut, memperkuat peran komunitas, serta mengoreksi bias kebijakan energi nasional yang berorientasi pada ekspansi dan proyek skala besar.

### Pembangunan Hijau

Berfokus pada mendorong keselarasan kebijakan iklim nasional dan daerah melalui pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan potensi lokal serta pelibatan masyarakat yang inklusif. Melalui penguatan kondisi pemungkin di tingkat daerah, program ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok rentan agar pembangunan responsif terhadap dampak perubahan iklim.



# Wilayah Kerja Kami



© Danar Tri Atmojo / MADANI Berkelanjutan



# Iklim dan Ekosistem

- 12 Masukan kebijakan disampaikan
- 14 Dialog kebijakan terlaksana
- 11 Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat nasional & global
- 6 Desa diperkuat dalam inisiatif ProKlim dan Perhutanan Sosial



## Menjaga Benteng Terakhir: Mengawal Kebijakan Iklim yang Berkeadilan

Tahun 2025 menjadi periode penting dalam upaya merespons krisis iklim yang semakin nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, MADANI memfokuskan kerja pada pengawalan agar ambisi iklim nasional tidak berhenti pada target dan angka, tetapi berakar pada perlindungan ekosistem serta pengakuan dan pemenuhan hak kelompok rentan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan advokasi kebijakan berbasis bukti dengan penguatan aksi iklim di tingkat tapak melalui inisiatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, MADANI berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk mengawal agenda legislasi strategis, khususnya RUU Keadilan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan Revisi RUU Kehutanan. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penyusunan Draft Naskah Akademik versi masyarakat sipil untuk RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat, yang digunakan sebagai rujukan dalam diskursus kebijakan. Proses ini memperkuat posisi koalisi masyarakat sipil dalam menyampaikan argumen hukum dan kebijakan yang menempatkan keadilan iklim dan perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok rentan sebagai prinsip utama.

Pengawalan kebijakan tidak berhenti pada penyusunan dokumen. MADANI turut mengembangkan kertas posisi RUU Keadilan Iklim dan terlibat dalam dialog dengan DPR untuk mendorong pembahasan RUU Masyarakat Adat. Selain itu, MADANI menyampaikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Revisi RUU Kehutanan, dengan menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari penguasaan hutan menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Di tingkat tapak, MADANI berupaya menjembatani kebijakan nasional dengan praktik aksi iklim berbasis komunitas melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Perhutanan Sosial. Bersama mitra lokal, upaya ini berkontribusi pada penguatan tata kelola lingkungan di tingkat desa. Pada 2025, kolaborasi dengan KKI Warsi mendorong terbitnya Peraturan Nagari Rangkang Luluh di Kabupaten Solok tentang penataan areal dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, bersama Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah, MADANI mendukung penyusunan Peraturan Desa di Lampo, Lumbudolo, dan Powelua (Lanskap Banawa Tengah), Kabupaten Donggala, tentang pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, MADANI bekerja sama dengan Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) dalam mendukung upaya perlindungan hutan alam tersisa di Lanskap Puna, Kabupaten Poso, melalui percepatan terbitnya SK Hutan Desa untuk Desa Sangginora seluas 1.200 hektare. Pembelajaran dari proses-proses ini menjadi bagian penting dalam memperkuat peran komunitas lokal sebagai aktor utama dalam aksi iklim sekaligus rujukan bagi pengembangan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Secara paralel, MADANI terlibat dalam mengawal perumusan dan implementasi kebijakan iklim nasional, termasuk mendorong Second NDC yang lebih ambisius dan berkeadilan. Melalui dialog dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kontribusi masukan kepada Sekretariat UNFCCC, MADANI mendorong pentingnya integrasi perlindungan ekosistem dan prinsip keadilan iklim dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks Nilai Ekonomi Karbon, MADANI memberikan rekomendasi kebijakan terkait penguatan kelembagaan dan kerangka hukum agar implementasinya berjalan secara transparan, akuntabel, dan adil.

Pengawasan tersebut juga mencakup aspek akuntabilitas pendanaan iklim. MADANI mendorong keterbukaan tata kelola pendanaan untuk memastikan operasionalisasi FOLU Net Sink 2030 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di tingkat global, MADANI terlibat dalam advokasi Tropical Forest Forever Facility (TFFF), termasuk memberikan masukan terhadap pengembangan concept note TFFF 3.0, serta memastikan kesiapan tata kelola kehutanan dan dampak jangka panjang yang berkeadilan bagi Indonesia.

Upaya di tingkat nasional diperkuat melalui konsolidasi masyarakat sipil dalam forum global. Melalui JustCOP (Justice Coalition for Our Planet), MADANI berkontribusi dalam penguatan koalisi lintas organisasi untuk memastikan perspektif keadilan iklim, serta perlindungan ekosistem dan hak-hak kelompok rentan hadir dalam diskursus serta negosiasi global, termasuk di dalam agenda COP30. MADANI juga membangun kolaborasi dengan CSO Indonesia dan global, memastikan bahwa suara komunitas lokal dan perspektif keadilan iklim, termasuk pendanaan iklim yang adil hadir dalam negosiasi dan diskursus global.





# Pertanian Berkelanjutan

- 3 Standar keberlanjutan disederhanakan melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*)
- 87 Masyarakat adat dan komunitas lokal terlibat dalam proses pendataan objek kebudayaan berbasis konservasi
- 14 Orang muda meningkat kapasitasnya dalam pengembangan strategi ekonomi lokal berbasis budaya dan ekologi
- 7 Rancangan Portofolio Investasi Lestari untuk 3 sektor kunci di Kapuas Hulu



## Memberdayakan Tapak: Menyelaraskan Ekonomi dengan Kelestarian

MADANI memandang pertanian bukan sebagai ancaman bagi hutan, melainkan sebagai bagian dari solusi krisis iklim ketika petani kecil dan masyarakat adat serta orang muda ditempatkan sebagai aktor utama. Program Pertanian Berkelanjutan dirancang untuk menjembatani perlindungan ekosistem dengan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan yang mengintegrasikan inovasi data, pemberdayaan berbasis budaya, dan pelestarian nilai budaya lokal.

Pada 2025, MADANI melanjutkan pengembangan PADI (Pranala Aksi Data Indonesia) sebagai sistem data terbuka untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang transparan dan akuntabel. Melalui PADI, MADANI menyederhanakan tiga standar penilaian seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *Accountability Framework initiatives* (AFi) menjadi alat penilaian mandiri (*Self-Assessment Tools/SAT*). Perangkat ini memungkinkan petani dan pelaku usaha pertanian melakukan penilaian mandiri secara bertahap terhadap praktik produksinya, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di tengah meningkatnya tuntutan pasar pada keberlanjutan. Aplikasi PADI kini dapat diakses melalui platform Android, iOS, dan web.

Di Kapuas Hulu, kami mendorong transisi ekonomi berkelanjutan dengan mengembangkan Portofolio Investasi Lestari (PIL) yang fokus pada komoditas strategis di tiga sektor kunci yaitu pangan, perikanan, dan biofarmaka.



© Danar Tri Atmojo / MADANI Berkelanjutan

Sejauh ini kami telah menyusun rancangan PIL untuk produk turunan Sengkubak dan Kratom, Royal Jelly dan Propolis, Tepung Ikan serta Ikan Kaleng. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ESG, memberdayakan pelaku lokal sebagai pengambil keputusan, serta mendorong diversifikasi ekonomi yang selaras dengan nilai budaya dan ekologi setempat. Dengan langkah ini, Dokumen ini disusun sebagai alat yang membantu pelaku usaha, investor dan pemerintah daerah untuk memetakan beragam potensi investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta menguntungkan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selain itu, bersama *Putussibau Art Community* memfasilitasi ruang pembelajaran dan dialog komunitas lokal melalui Baku Pikir terkait diskursus pemajuan kebudayaan dan ekonomi lokal yang lestari. Baku Pikir Pemajuan Kebudayaan menjadi ruang pertemuan bagi 87 anggota masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk komunitas adat dayak Iban, Tamambaloh, Taman Kapuas dan Melayu Kapuas Hulu untuk mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan yang terkait dengan praktik konservasi dan relasi ekologis. Proses ini menghasilkan data dan informasi awal mengenai pengetahuan lokal, tantangan pelestarian, serta praktik budaya yang terdampak perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasilnya diproyeksikan sebagai masukan dari tingkat tapak untuk memperkuat Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD).

Fondasi pengetahuan yang dibangun melalui Baku Pikir kemudian menjadi dasar pengembangan Baku Tukar Ekonomi Kasih Sayang, sebuah ruang pertukaran pengetahuan dan pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis komunitas. Melalui proses ini, 14 orang muda didorong untuk merumuskan strategi ekonomi lokal yang berakar pada nilai budaya, solidaritas, dan relasi ekologis, serta mengembangkan gagasan menjadi model bisnis sosial yang kontekstual, ramah alam, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dampak awal dari inisiatif ini terlihat dari tumbuhnya agen-agen perubahan lokal yang mulai merintis usaha berbasis budaya dan lingkungan, sekaligus menandai lahirnya benih inkubator bisnis sosial berbasis komunitas dengan Putussibau Art Community sebagai penggerak ekosistem ekonomi lokal berkelanjutan.

Pendekatan berbasis budaya tersebut diperluas melalui diskursus kampanye digital “8 Perempuan, 8 Harapan”, serta Hulu Indonesia Festival. Inisiatif ini berperan membangun pemahaman publik bahwa pertanian berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hak masyarakat adat, keadilan sosial, dan perlindungan ekosistem.

Secara keseluruhan, program Pertanian Berkelanjutan menunjukkan bahwa ketika data, budaya, dan ekonomi lokal berjalan beriringan, praktik pertanian dapat selaras dengan upaya pelestarian ekosistem dan peningkatan ekonomi masyarakat adat dan komunitas lokal.

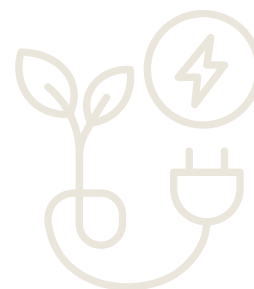


© Danar Tri Atmojo / MADANI Berkelanjutan



# Transisi Energi Berbasis Komunitas

- 1 Dokumen Profil Investasi Lestari sektor Energi Terbarukan Berbasis Komunitas
- 20 Kolaborasi dengan aliansi strategis yang melibatkan CSO, akademisi, dan pelaku usaha
- 1 Dokumen masukan kebijakan
- 1 Model sirkular bioenergi berbasis komunitas
- 1 Kajian kolaboratif sebagai rujukan



## Kedaulatan Energi: Solusi Bersih dari dan untuk Komunitas

Tahun 2025 menjadi fase penting bagi MADANI dalam memperkuat Transisi Energi Berbasis Komunitas sebagai bagian dalam mendorong kedaulatan energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas lokal. Di tengah percepatan agenda transisi energi nasional, MADANI mencermati tantangan besar terkait arah pengembangan energi bersih yang tersentralisasi, berskala besar dan minim keterlibatan masyarakat.

Salah satu sektor kunci dalam transisi energi nasional adalah bioenergi, khususnya pengembangan bahan bakar nabati (BBN). MADANI memandang bahwa kebijakan bioenergi yang bertumpu pada ekspansi industri berbasis lahan berisiko menimbulkan persoalan lingkungan, tata kelola, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan Transisi Energi Berbasis Komunitas dikembangkan sebagai alternatif yang menekankan model bioenergi terdesentralisasi, non-ekspansif, dan dikelola oleh komunitas lokal.

Di tingkat nasional, MADANI menyusun dan menyampaikan masukan kebijakan yang berjudul *Rasionalisasi Bauran Energi dan Transformasi Tata Kelola Bahan Bakar Nabati (BBN) di Indonesia* kepada Presiden serta kementerian terkait. Dokumen ini memberikan rekomendasi mengenai pentingnya diversifikasi bahan baku non-ekspansif, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan untuk memenuhi ambisi biofuel nasional. Upaya ini dilengkapi dengan kegiatan *press briefing* untuk memperluas jangkauan wacana di ruang publik.



Di tingkat ekonomi lokal, MADANI berhasil mengembangkan satu model sirkular bioenergi berbasis komunitas yang terintegrasi. Mulai dari inventarisasi bahan baku lokal seperti biji karet, pengolahan teknis menjadi biofuel, hingga perancangan skema ekonomi dan kelembagaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Model ini dirancang sebagai *blueprint* sistem energi yang terdesentralisasi dan berkelanjutan yang memungkinkan komunitas mengelola sumber energi mereka secara mandiri sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Untuk mendukung keberlanjutan inisiatif tersebut, MADANI juga menghasilkan satu dokumen profil investasi lestari bioenergi berbasis komunitas yang memetakan peluang pembiayaan dan skema usaha ramah lingkungan. Dokumen ini menjadi jembatan antara inisiatif komunitas dengan aktor pendanaan dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap transisi energi yang berkelanjutan. Kami juga membawa dokumen profil investasi ini ke berbagai forum investasi, seperti APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Otonomi Expo 2025 bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada ranah pengetahuan, MADANI bersama IESR, CIFOR, dan Koaksi menyusun satu kajian komprehensif mengenai dinamika biofuel di Indonesia dari hulu hingga hilir yang dikemas dalam bentuk buku. Kajian ini membahas perjalanan kebijakan biofuel, tantangan implementasi, pembelajaran global, hingga arah transformasi biofuel di Indonesia. Hasil kajian ini dapat menjadi acuan penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami masa depan biofuel di Indonesia secara lebih kritis dan sistemik.

Seluruh upaya tersebut diperkuat melalui lebih dari 20 kolaborasi dengan beberapa aliansi strategis yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha dalam isu transisi energi. Kolaborasi ini kami bangun untuk menciptakan ekosistem pengetahuan, advokasi, dan inovasi yang memperluas model transisi energi berbasis komunitas dalam diskursus publik maupun kebijakan. Melalui capaian ini, tahun 2025 menjadi bagian penting dalam pengembangan transisi energi berbasis komunitas di Indonesia.



© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan



# Pembangunan Hijau

- 146 Aparatur Perangkat Daerah lintas sektor yang ditingkatkan kapasitasnya
- 154 Masyarakat terlibat dalam advokasi partisipasi Pembangunan Berkelanjutan
- 5 Dokumen Masukan Kebijakan dan Produk Pengetahuan
- 10 Dialog Kebijakan dan Pertemuan Kolaborasi Strategis



## Akselerasi Kapasitas Daerah dan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah tekanan krisis iklim yang eskalatif, pembangunan berkelanjutan menuntut transformasi dari model pembangunan konvensional menuju paradigma yang mengintegrasikan aspek ekologis, inklusivitas sosial, dan stabilitas ekonomi. MADANI memandang perlunya pondasi bagi kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan lokal, tetapi juga selaras dengan komitmen global, yang dimulai dari penguatan kompetensi teknokratis pada sentral birokrasi daerah.

Mendukung hal itu, MADANI melakukan intervensi melalui *Masterclass* dan Bimbingan Teknis dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 11 kabupaten/kota di Maluku serta 75 orang representatif dari OPD di Sulawesi Tengah. Upaya ini merupakan bagian dari memperkuat kondisi pemungkin teknokratis yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam siklus perencanaan formal.

Sebagai bukti nyata, kapasitas yang terbangun telah diimplementasikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Maluku 2025-2029 serta penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Maluku 2026. Dengan mengintegrasikan strategi komoditas lestari ke dalam rancangan awal pembangunan, daerah kini memiliki instrumen yang lebih terukur untuk menyelaraskan diri dengan standar pembangunan hijau global. Kesiapan birokrasi dalam menyusun dokumen strategis yang berbasis data secara otomatis membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna dalam proses pengawasan dan implementasi.



© Aizah Fajriana / MADANI Berkelanjutan

Selain penguatan aspek teknokratis, MADANI mendorong pelibatan yang lebih bermakna dalam proses pembangunan. Melalui inisiatif “Sekolah Pembangunan”, 34 pemuda di Maluku terlibat dalam proses pembelajaran dan pemetaan pandangan terkait kebijakan iklim dan perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam perspektif kelompok muda dan masyarakat adat. Inisiatif ini bertujuan memperkuat pemahaman orang muda terhadap proses perumusan kebijakan dan perencanaan, sekaligus menjangkau aspirasi mereka untuk mendorong pelibatan bermakna dalam proses pembangunan.

Visibilitas suara lokal kemudian diperluas ke tingkat nasional melalui kehadiran perwakilan masyarakat adat dari Maluku dan Sulawesi Tengah dalam Indonesia Climate Justice Summit 2025. Selain itu, kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil yang melibatkan 73 orang muda dalam Pekan Nasional Lingkungan Hidup ke-14 turut memperkuat jejaring advokasi dan pertukaran pengetahuan antarwilayah.

Pada tingkat lintas sektor dan lintas wilayah, MADANI mendorong penguatan kesepahaman dalam pengelolaan lanskap sebagai prasyarat transformasi ekonomi berbasis potensi daerah. Pengembangan model “Skenario Kapuas 2060” di Kalimantan Barat, yang mencakup Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu, berfungsi sebagai kerangka diskusi jangka panjang untuk menyatukan visi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga integritas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas. Dialog kebijakan ini menghasilkan peta jalan awal investasi lestari di sektor unggulan, seperti perikanan, sekaligus mendorong keterhubungan dengan agenda kebijakan nasional.

Keterkaitan tersebut diperkuat melalui partisipasi MADANI dalam FGD bersama Bappenas terkait Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) serta keterlibatan dalam Konsultasi KLHS RPJMN 2025–2029. Dialog kebijakan mengenai Transfer Fiskal berbasis Ekologi (EFT) turut berkontribusi pada penguatan diskursus integrasi insentif lingkungan dalam mekanisme anggaran daerah. Upaya ini dilengkapi dengan kontribusi MADANI untuk data nasional dalam penyusunan Laporan Nasional ke-7 Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang memperkuat basis pengetahuan dalam perumusan kebijakan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Secara keseluruhan, capaian Program Pembangunan Hijau pada 2025 menunjukkan kontribusi MADANI dalam memperkuat kapasitas teknokratis daerah, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan rencana pembangunan, serta menyediakan ruang dialog dan pengetahuan pendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Capaian ini menjadi bagian penting untuk mendorong praktik perencanaan dan tata kelola pembangunan yang lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas di tingkat daerah.



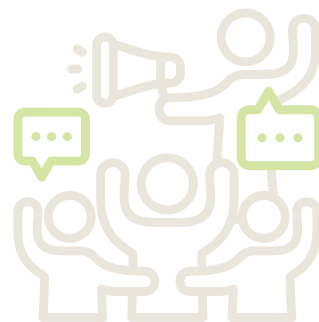


# Mengamplifikasi Narasi ke Publik

**16.753.404** Audiens yang berhasil dijangkau melalui berbagai platform media sosial MADANI

**268.209** Interaksi publik terhadap konten digital

- 10** Kolaborasi lintas aktor
- 214** Publikasi dan pemberitaan di media
- 2** Karya seni kolaborasi musisi Kapuas Hulu dan musisi nasional
- 21** Kegiatan seperti diskusi, workshop, pelatihan, kampanye, dan forum publik
- 10** Jaringan kolaboratif yang terbentuk untuk memperkuat advokasi dan gerakan bersama.



## Membangun Narasi Bersama dan Penggalangan Dukungan Lintas Sektor

Di tengah meningkatnya kompleksitas krisis iklim, konflik sumber daya alam, dan melambatnya agenda keadilan iklim di tingkat nasional maupun global, lini komunikasi menjadi ruang strategis untuk membentuk opini publik, memperluas solidaritas, menjaga isu-isu keadilan sosial-ekologis tetap relevan agar terus mendorong arah kebijakan menuju yang lebih baik. Di tahun 2025, ketika dinamika ruang kebijakan semakin kompetitif dan perhatian publik terhadap isu keadilan iklim terfragmentasi, ranah komunikasi digital dan konvensional berperan penting sebagai jembatan antara kerja advokasi berbasis data dengan kesadaran kolektif dan tekanan publik yang lebih luas.

Menjawab semakin terbatasnya ruang kebijakan dan perhatian publik terhadap isu keadilan iklim yang terpecah, MADANI memanfaatkan komunikasi digital sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran, memperluas dukungan publik, dan memperkuat dorongan kebijakan secara kolektif. Sepanjang 2025, MADANI mengembangkan strategi komunikasi dalam kampanye kreatif #TropisTipisTipis yang memadukan konten edukasi, advokasi kebijakan, dan cerita dari tapak. Melalui kampanye tersebut, MADANI berupaya menumbuhkan kesadaran publik bahwa krisis iklim tidak hanya dapat dikendalikan dengan perlindungan hutan tropis, namun juga keadilan sosial dan budaya.

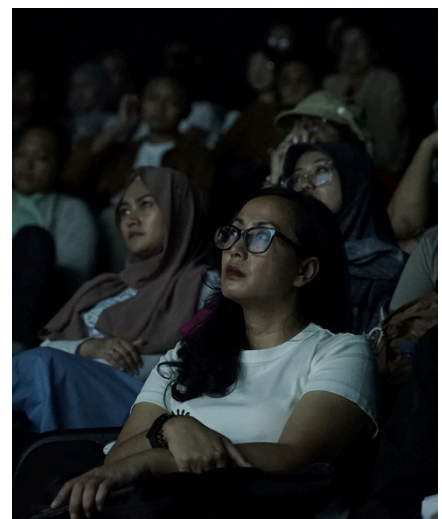


Selain itu, dalam rangka mengangkat realitas kelompok rentan yang mewakili masyarakat urban, sub-urban, dan pesisir, MADANI memproduksi film dokumenter DEMO(k)RAS(i) untuk meningkatkan pemahaman publik tentang keterkaitan krisis iklim, keadilan lingkungan, dan demokrasi. Di tahun 2025, MADANI mengadakan launching dan screening film yang merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menjangkau publik dan meningkatkan keterlibatan dalam isu demokrasi dan keadilan iklim. Rangkaian kegiatan tersebut digabungkan dengan Tropis Talks sebagai ruang diskusi komunitas dalam kampanye #TropisTipis-Tipis yang dirancang untuk mempertemukan karya bermakna dengan publik yang ingin memahami isu iklim secara lebih mendalam.



## 295 Orang mengikuti launching dan diskusi film Demo(k)ras(i)

Terdiri dari 45 peserta launching di Taman Ismail Marzuki (TIM) dan 250 peserta screening serta diskusi di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung, melibatkan mahasiswa, akademisi, aktivis, praktisi, dan komunitas sebagai basis dukungan baru untuk memperkuat advokasi keadilan iklim.







MADANI juga membangun diskursus publik dan kampanye kreatif melalui karya seni berupa musik. Kami berkolaborasi dengan musisi lokal King of Borneo dan Tuan Tigabelas melalui lagu “Suar”, sebagai media untuk menyuarakan tentang urgensi pengakuan masyarakat adat dan perlindungan hutan. Selain itu, kami juga menciptakan karya seni musik melalui kolaborasi dengan musisi lokal King of Borneo, Penutur Lisan Sastra Talimaa dari Suku Dayak Kayaan Mendalam, Kapuas Hulu dan Asteriska untuk menyuarakan keadilan iklim dan hak kelompok rentan.

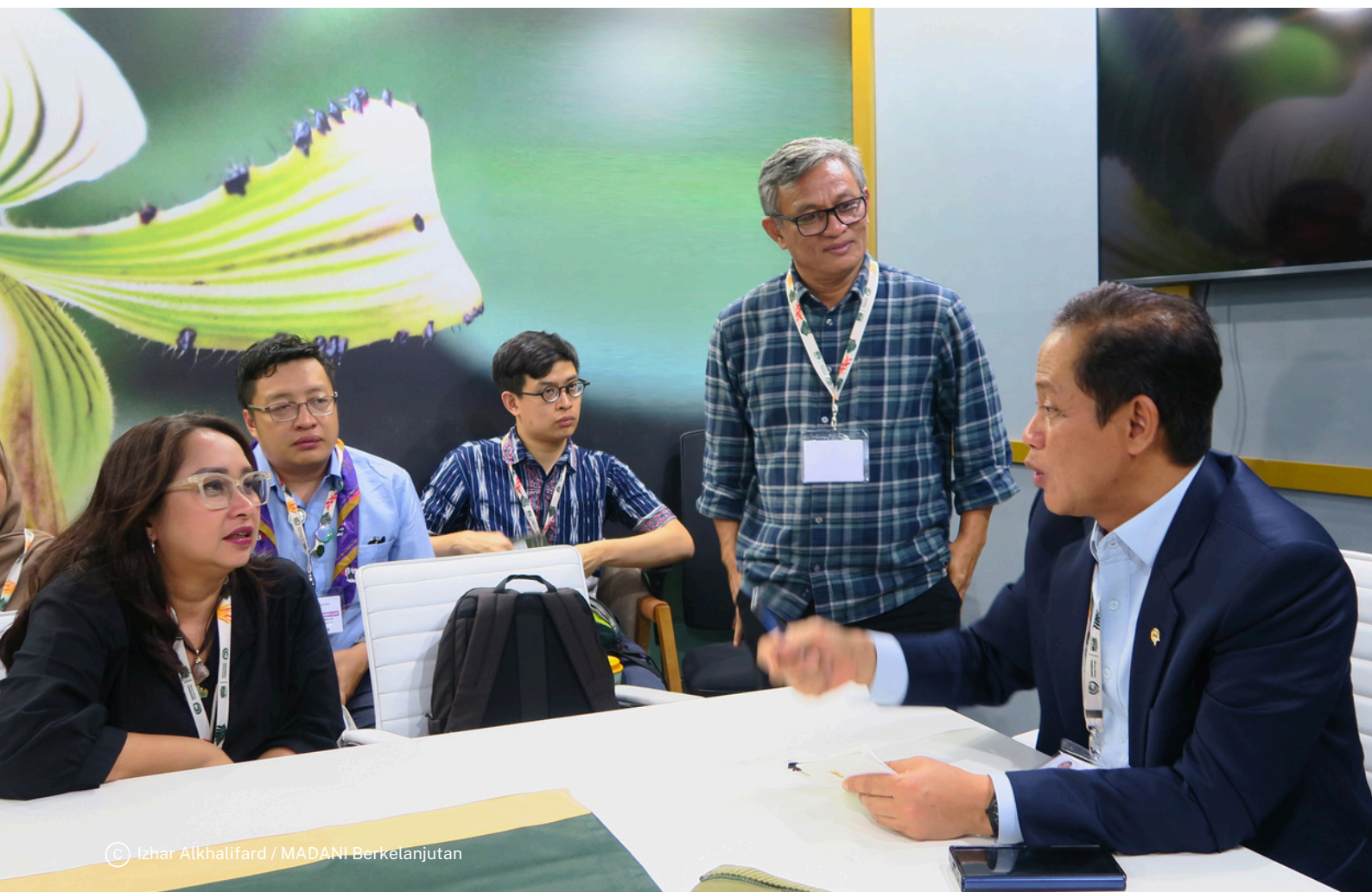
**Di ranah internasional**, MADANI berpartisipasi dalam agenda COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, sebagai bagian dari strategi menghubungkan isu tapak dengan dinamika kebijakan nasional dan internasional. Di COP30, MADANI terlibat dalam pemantauan isu kunci negosiasi, penyelenggaraan side events, dialog dengan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan, serta penguatan komunikasi publik melalui kampanye digital. Inovasi komunikasi Merapah Banua VR360 digunakan untuk membawa isu Kapuas Hulu dan pembelajaran perlindungan hutan berbasis pengetahuan tradisional ke panggung global.

Secara kumulatif, upaya komunikasi ini menghasilkan jangkauan lebih dari **16,7 juta akun dengan 268 ribu interaksi digital**, mencerminkan meluasnya paparan isu keadilan iklim dan meningkatnya keterlibatan publik terhadap narasi yang dibangun.



Tidak hanya berperan dalam lingkup digital kreatif dan event, MADANI juga berperan aktif dalam kerja komunikasi berbasis koalisi. Melalui Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, MADANI bersama organisasi anggota mengoordinasikan strategi komunikasi publik, advokasi kebijakan, dan konsolidasi nasional. Salah satu capaian penting adalah penyusunan policy brief bersama yang disepakati 47 organisasi, serta penguatan strategi lobi politik dan pemetaan pemangku kepentingan. Kerja kolektif ini berkontribusi pada lebih dari 200 liputan media, menguatnya dukungan lintas fraksi di parlemen, serta peningkatan dukungan publik melalui kanal digital.

Selain itu, melalui kolaborasi JustCOP (Justice Coalition for Our Planet), MADANI terlibat dalam mendinamisir komunikasi kolektif terkait keadilan iklim dalam momentum perhelatan pertemuan para pihak di COP 30, di Belem, Brasil. Koalisi ini melibatkan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, kelompok muda, kelompok disabilitas, serta perwakilan Masyarakat Adat. Dalam kerangka ini, MADANI berkontribusi pada pengelolaan newsroom kolaboratif, produksi siaran pers, diskusi publik, dan amplifikasi narasi bersama yang menempatkan keadilan iklim dan perspektif kelompok rentan sebagai pusat wacana. Secara keseluruhan, kerja-kerja Komunikasi pada 2025 berkontribusi dalam memperluas jangkauan isu, membangun narasi publik yang konsisten, memperkuat kerja koalisi, serta mendukung strategi advokasi MADANI melalui komunikasi yang terintegrasi, berbasis kolaborasi, dan berakar pada pengalaman tapak.





# Memperkuat Evidence dan Advokasi



## Manajemen Pengetahuan Menjadi Navigasi di Tengah Kerja-Kerja Advokasi dan Kampanye.

Fungsi Manajemen Pengetahuan MADANI bekerja untuk memastikan bahwa setiap strategi dan arah aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada fakta, evidence dan data terkini. Manajemen pengetahuan berfokus pada penguatan substansi dari aspek spasial dan legal. Analisis legal sangat diperlukan untuk bahan advokasi dan kampanye publik. Analisis ini berfokus pada peraturan-peraturan terbaru terkait dengan hutan, iklim, dan peraturan lain yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan. Sementara analisis spasial berfokus pada pengembangan analisis kondisi tutupan hutan dan lahan terbaru berdasarkan sumber dan metodologi yang ilmiah. Keseimbangan dua aspek ini akan menyempurnakan proses advokasi dan kampanye MADANI.

Sepanjang 2025, kami secara rutin dan berkala memproduksi beberapa data spasial seperti kondisi tutupan hutan dan lahan terbaru Indonesia, termasuk bagaimana angka hilangnya hutan alam (deforestasi) berdasarkan sumber yang kredibel. Dalam rangka memonitor kondisi kebakaran hutan (karhutla), kami mengembangkan model Area Indikatif Terbakar (AIT) yang memberikan informasi cepat terkait karhutla di Indonesia. Model ini memanfaatkan pola hotspot (titik panas) dengan ciri khas tertentu untuk mengidentifikasi area yang patut diduga terbakar. Kelebihan AIT adalah kemampuannya memilah mana hotspot yang merupakan titik karhutla dan mana yang bukan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat. Pada proses penyempurnaannya, AIT masih membutuhkan validasi lapangan untuk mendapatkan tangkapan karhutla secara sempurna.



Sementara itu, untuk mendukung advokasi perlindungan hutan dari ekspansi industri ekstraktif lahan, kami secara spesifik memproduksi penghitungan cap sawit berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga lain. Kami meyakini bahwa riset ini adalah langkah awal untuk membangun diskursus ilmiah dalam melindungi hutan alam tersisa dan lingkungan hidup.

Dalam konteks mendukung advokasi jaringan, kami juga aktif mendukung substansi dalam penyusunan dan perumusan Naskah Akademik dan draft usulan masyarakat sipil atas RUU Keadilan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan substansi atas revisi UU Kehutanan. Selain itu, kami juga turut mendukung advokasi kasus strategis, yaitu Food Estate di Merauke dan ketidakadilan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, melalui keterlibatan langsung di Solidaritas Merauke. Pada proses yudisial, kami juga mengirimkan analisis legal melalui pendapat sahabat pengadilan (*amicus curiae*) untuk Gugatan UU Cipta Kerja.

Pada level global, Manajemen Pengetahuan turut berperan sebagai pusat dokumentasi dan respon cepat terhadap dinamika kesepakatan dan negosiasi iklim global. Salah satunya adalah advokasi melalui surat kepada Uni Eropa perihal dukungan implementasi EUDR demi menyelamatkan hutan alam tersisa. MADANI memastikan masyarakat sipil Indonesia tetap memiliki posisi strategis dan relevan dalam diskursus iklim global. Berbekal berbagai data yang kami produksi, kami yakin dapat menjadi bekal dalam dialog-dialog internasional. Pengetahuan yang dikelola ini bukan hanya menjadi aset internal, tetapi menjadi rujukan bagi jurnalis, akademisi, dan mitra strategis lainnya dalam mengawal tata kelola hutan dan kehutanan di Indonesia.



- 3 Publikasi
- 6 Analisis Spasial Komprehensif
- 10 Analisis Regulasi dan Kebijakan
- 1 Model Deteksi Karhutla





# Analisis Dampak dan Pembelajaran

Tahun 2025 memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana kebijakan nasional bergerak cepat, sementara realitas di tingkat tapak membutuhkan waktu, proses, dan konsistensi. Di antara keduanya, MADANI perlu terus menyesuaikan strategi agar kerja advokasi tetap relevan dan berdampak.



## Dinamika Legislasi yang Cepat

Perubahan cepat dalam draf regulasi (seperti Revisi RUU Kehutanan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Keadilan Iklim) menuntut tim untuk bekerja ekstra cepat dalam menyusun naskah akademik yang tetap berbasis data dan bukti yang kuat.

Kami menyadari bahwa kerja advokasi tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Dinamisasi kekuatan masyarakat sipil yang lebih solid agar respon kebijakan tidak terfragmentasi sangat diperlukan. Momentum COP30 menjadi ruang awal untuk membangun aliansi strategis tersebut, yang kemudian berkembang dalam JustCOP. Aliansi ini tidak hanya berfungsi mengawal momentum global seperti COP UNFCCC, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi cepat antar-CSO untuk menyatukan posisi dan tujuan bersama (common goals) masyarakat sipil dalam merespon kebijakan iklim di tingkat nasional.



## Gap Kapasitas Perencanaan di Daerah

Dalam pendampingan di Maluku dan Kapuas Hulu, kami menemukan bahwa pemahaman mengenai "Pembangunan Hijau" seringkali masih dianggap sebagai beban administratif, bukan sebagai peluang ekonomi adaptif di tengah krisis iklim. Kondisi tersebut mengharuskan kami berpikir ulang dan merapikan pendekatan formal bimbingan teknis (Bimtek) menjadi Masterclass yang lebih praktis, dengan menunjukkan bagaimana perencanaan pembangunan daerah dapat sejalan dengan upaya perlindungan ekologi dan peningkatan ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk mencakup berbagai isu kunci lainnya dalam konteks pembangunan hijau seperti gender dan inklusivitas pembangunan.



© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan



## Ketidakpastian Arah Kebijakan dan Konteks Global

Tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa kerja advokasi iklim tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan ekonomi global yang semakin tidak pasti. Perubahan arah kebijakan nasional yang cepat, tekanan geopolitik global, fluktuasi ekonomi, serta pergeseran prioritas pembangunan mempengaruhi konsistensi komitmen terhadap agenda iklim dan lingkungan. Dalam situasi ini, ruang kebijakan menjadi lebih dinamis dan kadang tidak terprediksi, sehingga strategi advokasi perlu semakin adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kerja di tingkat tapak dan konsolidasi masyarakat sipil. Ketika arah kebijakan nasional dapat berubah dalam waktu singkat, keberlanjutan agenda keadilan iklim sangat bergantung pada kekuatan komunitas lokal, pemerintah daerah, serta jejaring masyarakat sipil yang solid. Pengalaman MADANI di Kapuas Hulu, Maluku, dan wilayah lain menunjukkan bahwa investasi pada kapasitas lokal dan aliansi masyarakat sipil bukan hanya strategi programatik, tetapi menjadi fondasi ketahanan gerakan keadilan iklim ke depan.

Pembelajaran ini menjadi dasar bagi arah kerja MADANI pada periode berikutnya: memperkuat basis pengetahuan, memperluas aliansi, dan memastikan bahwa kerja advokasi tetap berakar pada realitas masyarakat sekaligus mampu merespon dinamika global yang terus berubah.





# Dari perjalanan tahun 2025, MADANI memetik lima (5) pembelajaran utama:

© Izhar Alkhalifard / MADANI Berkelanjutan

1

## **Teknologi Harus Sejalan dengan Membangun Dialog**

Pengembangan Aplikasi PADI menyadarkan kami bahwa alat digital secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa adanya dialog mendalam dengan petani. Inovasi teknologi hanya akan diadopsi jika masyarakat merasa memiliki dan memahami manfaatnya bagi keberlanjutan usaha mereka.

2

## **Transisi Energi Bukan Sekedar Mengganti Bahan Bakar**

Melalui inisiatif Biodiesel Biji Karet, kami belajar bahwa transisi energi berkeadilan bukan hanya soal mengganti energi fosil, tetapi soal kedaulatan. Memanfaatkan potensi lokal (biji karet) terbukti lebih meningkatkan resiliensi komunitas dibandingkan mendatangkan teknologi luar yang mahal dan sulit dirawat.

3

## **Sinkronisasi Kerja Tapak dan Kebijakan Daerah Adalah Kunci Dampak Jangka Panjang**

Keberhasilan advokasi di tingkat tapak akan bersifat sementara jika tidak "dikunci" dalam dokumen perencanaan pemerintah dan kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, menghubungkan inisiatif dan kerja komunitas ke dalam RPJMD, Peraturan Desa/Peraturan Nagari merupakan langkah strategis untuk memastikan program tetap berjalan di bawah komitmen dan kebijakan di daerah dan tingkat lokal.

4

## **Pemberdayaan Komunitas Lokal Adalah Landasan Keberlanjutan Advokasi**

Penguatan kapasitas komunitas dalam ProKlim dan Perhutanan Sosial tidak hanya mendorong aksi iklim di tingkat lokal, tetapi juga memastikan bahwa isu iklim tetap "bernapas" dalam ruang-ruang pengambilan keputusan desa dan nagari. Komunitas yang percaya diri dan memiliki visi mampu menjadi aktor advokasi, bukan sekadar penerima manfaat program

5

## **Ketahanan Gerakan Masyarakat Sipil Menjadi Faktor Penentu Keberlanjutan Agenda Iklim**

Dalam konteks ketidakpastian kebijakan dan dinamika global, penguatan aliansi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan pemerintah daerah menjadi strategi penting untuk menjaga konsistensi advokasi. Pengalaman menuju COP30 menunjukkan bahwa ruang kolaborasi lintas aktor perlu terus dipelihara agar suara masyarakat tetap hadir dalam perumusan kebijakan nasional dan global.

# Laporan Keuangan

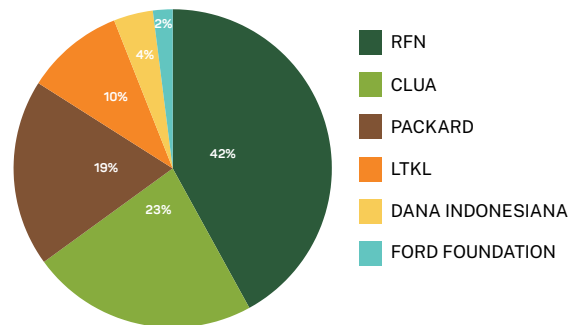
## Mengelola Amanah untuk Dampak Berkelanjutan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan kerja MADANI untuk terus tumbuh dan berkolaborasi. Kami menyadari bahwa setiap dukungan yang kami terima baik dari mitra pembangunan, lembaga pendanaan, maupun individu adalah sebuah amanah yang harus dikelola dengan standar integritas tertinggi.

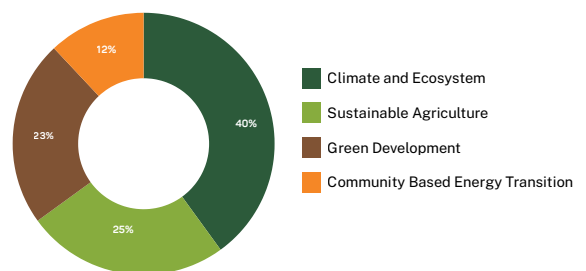
Bagi kami, laporan keuangan bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari pilihan strategis organisasi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sebagian besar sumber daya yang kami kelola dialokasikan secara langsung untuk mendukung inisiatif di tingkat kebijakan dan pemberdayaan di tingkat tapak. Di saat yang sama, efisiensi operasional terus dijaga agar pengelolaan organisasi tetap proporsional dan tidak mengurangi daya dorong program.

Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus terbuka terhadap publik dan memastikan bahwa pertumbuhan organisasi berjalan beriringan dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak.

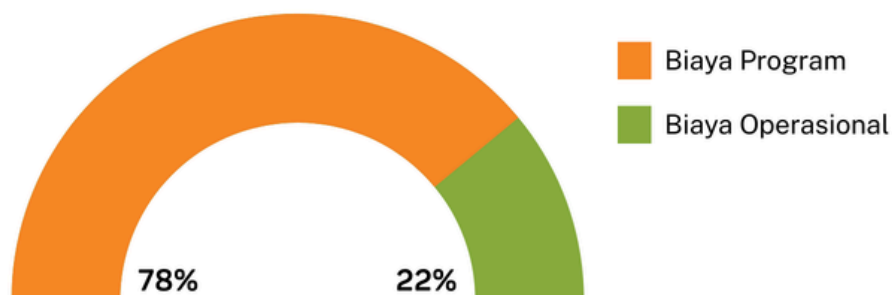
### SUMBER PENDANAAN: Rp9,907,150,976



### ALOKASI PENDANAAN KE PROGRAM



## PERSENTASE BIAYA PROGRAM DIBANDINGKAN BIAYA OPERASIONAL





# Penutup

## Menyongsong Satu Dekade: Komitmen untuk Dampak yang Lebih Luas

Tahun 2026 menandai tepat sepuluh tahun perjalanan MADANI Berkelanjutan hadir di tengah dinamika masyarakat sipil Indonesia. Sebuah dekade yang penuh dengan pembelajaran, kolaborasi, dan dedikasi untuk menjaga ekosistem nusantara.

Kami menyadari bahwa tantangan krisis iklim ke depan semakin besar. Oleh karena itu, memasuki dekade kedua, MADANI telah bersiap untuk fase “naik kelas”. Bagi kami, ini bukan soal memperbesar skala organisasi semata, melainkan tentang bagaimana kami bisa memberikan dampak yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih sistemik. Kami berkomitmen untuk mentransformasi seluruh pengalaman sepuluh tahun ini menjadi daya dorong yang lebih kuat bagi kebijakan iklim yang berkeadilan.

Dalam proses menuju pendewasaan organisasi ini, profesionalitas dan integritas tetap menjadi acuan utama kami. Kami percaya bahwa kepercayaan yang dititipkan oleh donor, mitra, dan masyarakat hanya dapat dijaga melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendewasaan ini berarti kami semakin selektif, semakin efektif dalam mengelola sumber daya, dan semakin konsisten dalam menghasilkan karya yang berbasis bukti.

Memasuki periode menuju dekade kedua MADANI, kami melihat bahwa tantangan ke depan tidak hanya pada skala krisis iklim, tetapi juga pada ketidakpastian arah kebijakan dan ekonomi global. Karena itu, penguatan kolaborasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan komunitas lokal akan menjadi fokus utama kerja kami ke depan.

MADANI akan terus menjadi pembuka ruang dialog yang inklusif. Kami ingin menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan untuk satu tujuan besar, yaitu mewujudkan keadilan iklim. Namun, dialog tanpa aksi adalah hampa. Melalui inovasi seperti Aplikasi PADI, pengembangan bioenergi komunitas, dan pengawalan kebijakan nasional, kami membuktikan bahwa gagasan besar dapat diwujudkan dalam aksi nyata di tingkat tapak.





## **Mari Berkolaborasi untuk Dekade Selanjutnya**

Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari fase penguatan MADANI. Dukungan Anda akan membantu kami memperdalam dampak kerja, memperkuat advokasi, terus berinovasi dan memastikan pembangunan hijau dijalankan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Hubungi Kami untuk Berkolaborasi**

Alamat Kantor: Jl. Mesjid Al Hidayah No.14A, RT.4/RW.7, West Pejaten, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520

Email: [info@madaniberkelanjutan.id](mailto:info@madaniberkelanjutan.id)

Telepon: (021) 26962838





Copyright © 2026  
Yayasan MADANI Berkelanjutan